

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum DP3AP2KB**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk

itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **1.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub. Bagian Program
  2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
  1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
- IV. Bidang Perlindungan Anak
  1. Seksi Pemenuhan Hak Anak
  2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
  3. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Berencana.
- VI. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. Seksi Jaminan Ber-KB;
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
  3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- VII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2. TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

### **Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. Menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam

- lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
  - i. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - k. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat

#### 1. Jumlah Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

#### 2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

Tabel.Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	22
4.	D III	2
5.	SMA	8
JUMLAH		35

#### 3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan

Tabel. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	4
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	3
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		35

#### 4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki	Perempuan
1	IV	1	5
2	III	5	18
3	II	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>26</b>

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata 1 sebanyak 22 orang (62,86%), Pasca Sarjana sebanyak 3 orang (8,57%), Diploma III sebanyak 2 orang (5,71%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang (22,86%). Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang, S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang, S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 24 orang, S1 13 orang, D3 2 orang dan SMA 9 orang.

DP3AP2KB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional

program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 1.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN IKK KELUARAN/OUTPUT

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
		289	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		43	43	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		290	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		13	13	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		291	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Media Massa		6 Media	Bid. Perlindungan Anak
		292	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah Layanan Anak 10 Lembaga		8 Lembaga	Bid. Perlindungan Anak
		293	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat Kabupaten	( <u>16</u> x 100%) 16	100%	Bid. Perlindungan Anak
		294	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah Layanan Anak 10 Lembaga		10 Lembaga	Bid. Perlindungan Anak
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			1	Dinas Sosial
		296	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah ormas pr yg sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh ormas yg ada}} \times 100\%$	- Ormas 24 - LSM 4	28	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		297	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	$\frac{\text{Jumlah kader pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh kader pr}} \times 100\%$		62	62 Kader Bid. Pemberdayaan Perempuan
		298	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lembaga layanan PP yg sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh lembaga layanan yg aktif}} \times 100\%$	- Ormas 24 - LSM 4	28	Bid. Pemberdayaan Perempuan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1. P2TP2A 2. PUSPAGA	2	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		300	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	-	Belum ada kebijakan
		301	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	-	-	-	Blm ada lembaga di Kep. selayar
		302	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$ 100%	-	
<b>2.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-		Tidak Tersedia	Keterbatasan Anggaran
		337	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-		$\geq 20$	Bid. Dalduk
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Remaja Kelompok Umur 15-19 Tahun}}{\text{Jumlah kelompok umur 15 - 19}} \times 100\%$	$\frac{331}{13147} \times 100\%$	0,025	Bid. Dalduk
		339	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi \& KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$	$\frac{339}{35.706} \times 100\%$	0,94%	Bid. Dalduk
		340	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	$\frac{\text{Jumlah stakeholder \& mitra kerja yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK}}{\text{Jumlah sasaran stakeholder pemangku kepentingan \& mitra kerja}} \times 100\%$	$\frac{17}{20} \times 100\%$	0,85%	Bid. Dalduk
		341	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah Faskes}} \times 100\%$	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100%	Bid. Dalduk
		342	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah MKJP}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{3.792}{19.333} \times 100\%$	0,196	Bid. Dalduk
		343	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Pokja Kampung KB	27	Bid. Dalduk

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		344 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{7}{19254} \times 100 \%$	0,036	Bid. Dalduk	
		345 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		<i>Kesertaan KB terendah berada di Kec Buki yaitu hanya sebesar 458 Peserta</i>	458 (54,14%)	Bid. Dalduk	
		346 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{9.932}{97143} \times 100 \%$	0,102	Bid. Dalduk	

## 2.2 . Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD	$\frac{616339292210}{1136008538012} \times 100\%$	<b>0,543</b>	PP
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	$\frac{16}{35422} \times 100\%$	0,045	Bid. Perlindungan Anak
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	$\frac{6}{62.714} \times 100.000\%$	<b>9,56</b>	PP
<b>2</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,2	Bid. Dalduk
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{14.025}{19.333} \times 100\%$	0,72	Dallap 2022 PUS Peserta KB Modern & Tradisional
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{3.295}{19.333} \times 100\%$	0,17	Dallap 2022 PUS bukan Peserta KB

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Dalam upaya peningkatan akses Pelayanan KB dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak di perlukan dukungan kebijakan dan dukungan operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dukungan kebijakan yang sangat diperlukan lebih difokuskan dalam hal Pemberdayaan kapasitas institusi, sehingga mampu mengelola kepentingan daerah secara umum dan kepentingan program KB dan Pemberdayaan Perempuan khususnya.

Dalam era otonomi daerah saat ini, tidak sedikit petugas lapangan dan penyuluh KB dialih tugaskan untuk menduduki jabatan tertentu yang menyebabkan roda pelaksanaan program KB belakangan ini dirasakan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan upaya penggantian dan penambahan petugas lapangan dan penyuluh lapangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan adanya LPPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan Akuntabilitas, kami menyadari dalam penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan usulan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LPPD tahun berikutnya.

Benteng, 09 Februari 2023

KEPALA DINAS,

**Drs. ANDI MASSAILE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

